

**ANALISIS ATAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN KAS
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
KOTA TOMOHON**

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CASH DISBURSEMENT INTERNAL CONTROL
SYSTEM AT THE REGIONAL REVENUE AND FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY (BPKPD) OF
TOMOHON CITY*

Oleh:

**Vina Abdulah¹
Jantje Tinangon²
Djeini Maradesa³**

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹vina.abdulah01@gmail.com

²jantje788@gmail.com

³djeinim@unsrat.ac.id

Abstrak: Sistem pengendalian intern merupakan sebuah sistem yang sangat penting diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan maupun organisasi atau perusahaan karena bertujuan untuk membantu semua entitas dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon sudah berjalan dengan baik dan telah menerapkan sebagian unsur-unsur yang ada dalam sistem pengendalian intern berdasarkan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran Kas.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kas, Pengendalian Intern, Pengeluaran Kas

Abstract: The internal control system is a system that is very important to implement in a government agency or organization or company because it aims to assist all entities in achieving common goals. Based on Government Regulation Number 60 of 2008 the internal control system is defined as an integral process of actions and activities carried out continuously by leaders and all employees to provide adequate assurance of achieving organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, asset security State, and adherence to legislation. The purpose of this study was to find out how the implementation of the cash disbursement internal control system at the Regional Revenue and Financial Management Agency (BPKPD) of Tomohon City. In this study using a qualitative approach to the method of analysis used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of the internal control system for cash disbursements at the Regional Revenue and Financial Management Agency (BPKPD) of Tomohon City has been going well and has implemented some of the elements in the internal control system based on the rules that apply in implementing cash disbursement procedures

Keywords: Internal Control System, Cash, Internal Control, Cash Disbursement

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana Indonesia sendiri memiliki sekitar 16.671 pulau yang ada, ini menjadikan Indonesia terkenal dengan berbagai keberagaman yang ada karena selain disebut negara kepulauan Indonesia sendiri memiliki keberagaman seperti adat, suku, budaya dan bahasa yang berbeda-beda disetiap daerah di Indonesia.

Selain disebut sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan Negara hukum, artinya bahwa segala aspek kehidupan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku, begitupun yang terjadi dalam roda Pemerintahan Indonesia bahwa dalam mengatur semua urusan pemerintahan ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur semua urusan pemerintah maupun peraturan lainnya, itu semua diberlakukan untuk menjamin semua urusan pemerintahan agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008, yaitu tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana salah satu peraturan yang didasarkan oleh suatu instansi pemerintah dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern untuk mencapai suatu visi misi yang ada dalam suatu instansi Pemerintahan tersebut.

Pada umumnya sistem pengendalian intern telah diterapkan pada semua instansi pemerintahan, bukan hanya pada instansi pemerintahan tetapi juga pada oraganisasi maupun perusahaan, karena pada dasarnya sistem pengendalian Intern ini dibutuhkan sebuah sistem pengendalian intern dalam mengawasi setiap kegiatan-kegiatan kas yang didalamnya. Tentu dalam hal ini tanpa adanya pengendalian intern dapat memudahkan timbulnya masalah-masalah yang ada dalam kas terlebih khusus dalam pengeluaran kas sendiri. Prosedur-prosedur yang digunakan dalam kas biasanya berbeda antara instansi satu dengan instansi lainnya. Hal ini tergantung pada berbagai faktor yang ada seperti besarnya instansi, jumlah karyawan, sumber-sumber kas dan sebagainya.

Seperti halnya dengan BPKPD Kota Tomohon, masalah bukanlah suatu hal yang di inginkan, sering kali terjadi masalah yang menimbulkan kegiatan pengeluaran kas yang ada di BPKPD Kota Tomohon belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi awal di BPKPD Kota Tomohon bahwa dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran salah satu penyebab kegiatan pengeluaran kas belum berjalan dengan baik karena ada keterlambatan dalam pencairan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ini disebabkan karena berkas-berkas yang ada dalam Surat Perintah Membayar Ganti Uang (GU), Langsung (LS), Tambah Uang (TU) belum memenuhi syarat atau belum lengkap, sehingga bendahara pengeluaran tidak bisa menerbitkan SPP dan SPM jika berkas tersebut tidak lengkap, sedangkan jika ditelusuri lebih dalam lagi bahwa perubahan peraturan daerah dapat menimbulkan resiko bagi kinerja karyawan karena adanya pergantian ataupun pemindahan karyawan dalam setiap bidang dalam SKPD membuat kinerja karyawan belum efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga ada beberapa faktor yang terjadi karena ada pergantian karyawan seperti kurangnya pemahaman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak sesuai dengan bidangnya, latar belakang pendidikan yang berbeda membuat karyawan tersebut susah beradaptasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Untuk itu dalam menangani resiko tersebut dibutuhkan sistem pengendalian intern pengeluaran kas dalam menangani masalah atau resiko yang ditimbulkan, untuk itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) Kota Tomohon.

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern pengeluaran Kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FSAB) (2017) Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Paul Gradi (2017) Akuntansi yaitu sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya

Akuntansi Pemerintahan

Pramudiana (2017:23) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atau hasil dari proses yang dilakukan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2016:425) pengeluaran kas harus menggunakan cek, tetapi jika pengeluaran kas dalam jumlah kecil tidak perlu menggunakan cek. Manfaat dalam menggunakan cek adalah menjamin keamanan dalam pengeluaran kas karena setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat secara andal. Selain itu pengeluaran kas juga memiliki prosedur pengeluaran kas yang merupakan sebuah kegiatan dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pada pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan negara yang menjelaskan prosedur pengeluaran kas yang dimulai dari tahapan:

1. **Penyiapan anggaran kas pemerintah daerah**
Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
2. **Surat Penyediaan Dana (SPD)**
Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.
3. **Besaran Uang Persediaan**
Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.
4. **Surat Permintaan Pembayaran (SPP)**
Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja.
5. **Surat Perintah Membayar (SPM)**
Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut.
6. **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)**
Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan.
7. **Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran**
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Sistem Pengendalian Intern

Menurut COSO yang dikutip dalam Sujarweni (2015:70), pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

COSO adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staff, untuk membuat reasonable assurance mengenai:

- a. Efektifitas dan efisiensi operasional
- b. Reliabilitas pelaporan keuangan
- c. Kepatuha atas hukum dan peraturan yang berlaku

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan

efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, bahwa Sistem Pengendalian Intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilukungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Terdapat 5 unsur SPIP yang perlu diimplementasikan oleh seluruh pimpinan dan staf pada semua jajaran instansi pemerintah, yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian, Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian risiko, Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan pengendalian, Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d. Informasi dan komunikasi, Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya

Dalam menerapkan unsur SPIP, pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Yuliani (2022) Analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal pada badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bppkad) kabupaten magetan. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi sistem informasi akuntansi di BPPKAD Kabupaten Magetan sudah efektif berbasis sistem komputerisasi. Sistem yang digunakan dalam prosedur pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas adalah SIMDA (Sistem Informa.

Samaliwu (2022) Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Masanae (2022) Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Analisis Implementasi Pp Nomor 60 Tahun 2008 Pada Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (Bpkpad) Kabupaten Purworejo telah berjalan sesuai pearturan yang berlaku dan Sistem Pengendalian Aset tetap telah berjalan dengan efektif

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana dalam penelitian kualitatif deskriptif ini mendeskripsikan dengan jelas keadaan yang terjadi pada objek penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga dalam penelitian ini akan secara langsung mendatangi objek penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang berlokasi di Jl. Slanag Kolongan Satu Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan maret 2023 sampai dengan selesai

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari objek penelitian, penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang dimana penelitian ini menggunakan jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dalam mengumpulkan data maka akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh hasil wawancara dengan Sekretaris Vonny Sompotan, SE, dengan Bendahara Pengeluaran Kas Olivia Tangkere, SE. dan salah satu staff kantor Rilva Retor

Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari informasi yang diperoleh untuk dijadikan dasar dari sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu memperoleh data secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara, dan yang diperoleh berupa hasil wawancara yang didapatkan secara langsung dari tempat penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu Peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap analisis penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
2. Wawancara, yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga mendapatkan hasil jawaban dalam suatu topic pembicaraan tertentu dan dengan wawancara juga, maka akan mengetahui hal-hal yang lebih dalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah yang berhubungan dengan instansi

Metode dan Proses Analisis Data

Metode Analisis

Analisis data merupakan proses berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan upaya yang penting. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, mengolah kembali dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang dihadapi

Proses Analisis

1. Pengumpulan Data

Ini adalah tahap yang pertama yang dilakukan dalam penelitian, dimana pada tahap ini akan melakukan peninjauan langsung di objek penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon untuk mendapatkan sebuah data primer yang dibutuhkan dan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon juga dengan Sekretaris Badan dan yang terakhir dengan Bendahara Pengeluaran Kas

2. Mengolah dan Mengevaluasi Data

Pada tahap ini maka akan melibatkan transkripsi wawancara serta dokumentasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mengenai Penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya pada tahap ini, data yang telah dianalisis dan juga dikelola ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

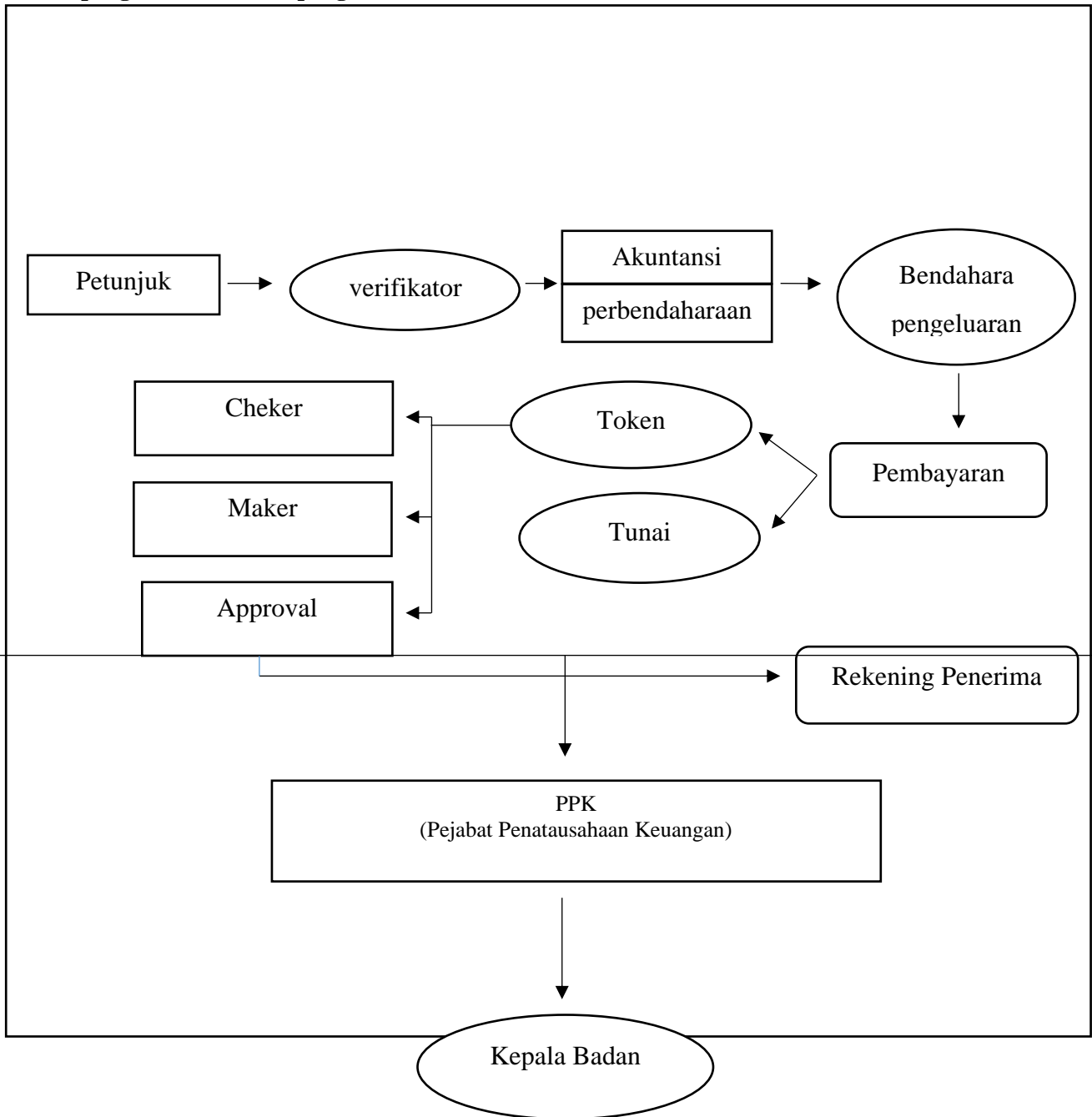
4. Melaporkan Hasil Penelitian

Pada tahap terakhir ini akan melaporkan hasil penelitian setelah terjawabnya rumusan masalah yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sistem pengendalian intern pengeluaran kas



Dalam Prosedur pengeluaran kas, sistem Pengendalian Intern adalah hal yang sangat penting diterapkan dalam suatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena dengan adanya sistem pengendalian intern membantu suatu SKPD dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik. Begitu juga yang diterapkan dalam BPKPD Kota Tomohon dimana dalam menjalankan prosedur pengeluaran kas dengan baik BPKPD Kota Tomohon menerapkan sistem Pengendalian intern atau yang disebut dengan pengawasan.

Seperti yang digambarkan dalam flowchart diatas menunjukkan suatu sistem pengendalian intern dalam prosedur pengeluaran kas diBPKPD Kota Tomohon, dimana dalam menjalankan pengendalian intern atau pengawasan prosedur pengeluaran kas dimulai dari penunjukan dimana penunjukan disini artinya dimulai dari adanya Kegiatan (Belanja ATK, Foto copy, Makan dan Minum, Pemeliharaan alat-alat dll..) atau Jaldis (Perjalanan dinas) yang akan dilaksanakan tapi sebelumnya harus diverifikasi oleh seorang staf administrasi pengeluaran kas atau dicek kembali persyaratan-persyaratan, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak jika sudah selesai dicek setelah itu akan diperiksa kembali sesuai dengan tugas dan fungsi bagian akuntansi dan Perbendaharaan .

Dalam pemeriksaan tugas dan fungsi akuntansi dan perbendaharaan maka dalam akuntansi akan dilakukan pemeriksaan apakah dalam melaksanakan kegiatan pencatatannya sudah benar atau belum sedangkan dalam perbendaharaan apakah dana kasnya ada atau tidak berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan tugas dan fungsi akuntansi dan perbendaharaan maka setelah itu akan dilakukan pemeriksaan oleh bendahara pengeluaran sebelum disetujui dimana bendahara akan mengecek ketersediaan dana kas yang ada jika dana kas yang ada untuk kegiatan atau jaldis yang akan dilakukan tersedia maka bendahara akan melakukan proses pembayaran, pembayaran ini terdapat dua macam pembayaran yaitu Tunai dan Non Tunai atau disebut Token, pembayaran Tunai dilakukan untuk membayar tagihan dengan jumlah yang kecil-kecilan dengan jumlah maksimal lima juta rupiah sedangkan pembayaran non tunai atau dengan Token dilakukan untuk pembayaran dengan jumlah tagihan yang besar, akan tetapi metode pembayaran yang sering digunakan yaitu dengan Non Tunai atau Token.

Dalam Proses Pembayaran dengan Menggunakan metode pembayaran Token ada tiga tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu Checker, Maker dan approval ketika ketiga tahap tersebut dilakukan maka akan keluar bukti Token untuk kegiatan atau jaldis yang akan dilaksanakan dan setelah proses pembayaran dengan metode pembayaran melalui ketiga tahap tersebut dilakukan maka bendahara pengeluaran akan mengirim langsung anggaran kegiatan kepada rekening penerima.

Dalam sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang bertanggung jawab didalamnya yaitu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dimana PPK bertugas untuk mengawasi semua tugas dan tanggung jawab yang dijalankan dalam pengendalian intern pengeluaran kas sehingga PPK Wajib mendapatkan hasil laporan pengeluaran kas dan melaporkan Laporan Pengeluaran Kas kepada Pengguna anggaran selaku kepala badan, sehingga ketika kepala badan sudah mendapatkan laporan hasil pengeluaran kas maka pengguna anggaran selaku kepala badan juga wajib melaporkan kepada walikota melalui sekretaris daerah Sedangkan pelaksanaan sistem pengendalian intern berdasarkan Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 bahwa analisis penerapan sistem pengendalian dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas terdiri dari 5 unsur yang ada yang telah diterapkan yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian,

Dalam Lingkungan pengendalian, pelaksanaan prosedur pengeluaran kas dilakukan atau diterapkan berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, Selain itu juga adanya kepemimpinan yang kondusif yang dilakukan oleh pimpinan/kepala badan dimana dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas kepala badan turut serta dalam mengambil setiap keputusan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang selain itu juga adanya penerapan sikap integritas dan etika yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas .

2. Penilaian Resiko,

Penilaian Resiko yang ada dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yaitu biasanya terjadi dua resiko yaitu resiko internal dan resiko eksternal dimana resiko internal yaitu kelengkapan dokumen yang tidak lengkap pada saat verifikasi berkas pada saat penerbitan SPP dan SPM. Sedangkan Risiko Eksternal Yaitu kendala sistem SIPD yang dimana proses penerbitan SPP dan SPM belum bisa diproses karena jaringan sistem SIPD tidak bisa diakses.

3. Kegiatan Pengendalian,

Kegiatan Pengendalian yang dilakukan dalam Prosedur Pengeluaran Kas Yang ada dalam BPKPD Kota Tomohon Yaitu dimana dalam menjalankan prosedur pengeluaran kas Kepala badan selalu mengkoordinir dan mengawasi jalannya pelaksanaan prosedur pengeluaran kas, seperti halnya kepala badan selalu berdiskusi

dengan bendahara pengeluaran untuk membahas pelaksanaan prosedur pengeluaran kas, jika ada kendala atau masalah yang ditemui maka kepala badan berusaha membantu bendahara pengeluaran dalam menangani masalah tersebut.

4. Informasi dan Komunikasi,

Informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran yang ada dalam BPKPD Kota Tomohon untuk Informasi yang digunakan oleh BPKPD Kota Tomohon yaitu sistem informasi dari pemerintahan pusat dimana untuk pembaharuannya selalu mengikuti dan sesuai dengan kebijakan dari pusat seperti Penggunaan Sistem SIPD. Sedangkan Untuk Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yaitu Seperti komunikasi melalui telepon kantor juga Handphone pribadi, selain itu ada juga media sosial yang digunakan seperti Whatsapp, Facebook, Email dan Website BPKPD Kota Tomohon.

5. Pemantauan,

Dalam Pemantauan yang dilakukan dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh Kepala Badan maupun yang dilakukan oleh PPK ataupun Kepala- Kepala Bidang yang ada terlebih khusus dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas dimana bisa dilihat bahwa kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh BPKPD Kota Tomohon telah berjalan dengan baik melalui hasil pencapaian yang telah didapatkan BPKPD Kota Tomohon yaitu berhasil mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dimana menandakan bahwa semua kegiatan tugas dan tanggung jawab yang ada di BPKPD Kota Tomohon telah berjalan dengan baik.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan mengenai sistem pengendalian intern pengeluaran kas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembahasan penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai analisis atas penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang ada di BPKPD Kota Tomohon. Yang dimulai dengan pelaksanaan prosedur pengeluaran kas.

Pelaksanaan Prosedur pengeluaran kas

1. Pelaksanaan prosedur pengeluaran kas Ganti Uang (GU)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam proses prosedur pengeluaran kas GU (ganti Uang) dimulai dari tahapan perencanaan atau penganggaran dimana dalam proses perencanaan atau penganggaran PPKD beserta kepala badan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun merencanakan serta menyetujui perencanaan dan penganggaran kegiatan, setelah penganggaran selesai disusun maka diserahkan kepada Kuasa BUD (Bendahara umum daerah) untuk menyiapkan dana anggaran yang telah direncanakan namun sebelumnya Kuasa BUD berhak untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi bagian anggaran, setelah selesai BUD wajib menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Setelah BUD menerbitkan SPD, PPKD atau setiap bidang-bidang yang akan membuat kegiatan atau perjalanan dinas wajib membuat SPJ kegiatan, setelah SPJ Kegiatan dibuat maka masuk dalam tahapan verifikasi berkas atau pengecekan kelengkapan berkas yang ada sehingga jika berkas tidak lengkap dalam setiap SPJ kegiatan maka bendahara pengeluaran tidak bisa melanjutkan proses penerbitan SPP, Setelah pengecekan berkas sudah lengkap maka akan masuk ke sistem SIPD, dimana akan di input dalam hal ini nomor kwitansi yang ada dalam SPJ untuk pembuatan TBP juga LPJ kegiatan. Setelah TBP dan LPJ kegiatan diterbitkan maka langsung membuat penerbitan SPM melalui TBP yang telah dibuat.

SPJ kegiatan, SPP, TBP, LPJ juga SPM setelah selesai diterbitkan langsung dibawah ke BUD untuk proses pembuatan SP2D namun BUD wajib verifikasi kelengkapan berkas atau pengecekan kembali berkas-berkas yang masuk sebelum kuasa BUD menerbitkan SP2D serta menyetujui juga mengesep, setelah SP2D diterbitkan selanjutnya SP2D juga SPJ kegiatan, SPP, SPM, TBP dan LPJ selesai dibuat maka langsung dibawah ke bank untuk di pindah bukukan dari rekening RKUD ke rekening bendahara pengeluaran, setelah dana kas masuk bendahara pengeluaran maka bendahara pengeluaran langsung mengirimkan dana ke rekening pihak ketiga.

2. Pelaksanaan prosedur pengeluaran kas pembayaran Langsung (LS)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam prosedur pengeluaran kas pembayaran langsung (LS) yang ada dalam BPKPD kota Tomohon dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, dimana dalam proses perencanaan atau penganggaran PPKD beserta kepala badan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun merencanakan serta menyetujui perencanaan dan penganggaran dalam sebuah kegiatan, setelah penganggaran selesai disusun maka diserahkan kepada Kuasa BUD (Bendahara umum daerah) untuk menyiapkan dana anggaran yang telah direncanakan tapi sebelumnya Kuasa BUD berhak untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi bagian anggaran, setelah itu BUD wajib menerbitkan Surat Penyediaan

Dana(SPD).

Setelah BUD menerbitkan SPD, maka kepala sub bagian umum akan merekap daftar hadir karyawan selama satu bulan bekerja untuk dijadikan SPJ, setelah SPJ Kegiatan dibuat maka masuk dalam tahapan verifikasi berkas atau pengecekan kelengkapan berkas yang ada sehingga jika berkas tidak lengkap dalam setiap SPJ LS maka bendahara pengeluaran tidak bisa melanjutkan proses penerbitan SPP, Setelah pengecekan berkas sudah lengkap maka akan masuk ke sistem SIPD, dan akan langsung membuat SPP juga SPM LS juga langsung diterbitkan langsung dari sistem SIPD.

setelah SPJ LS, SPP dan SPM selesai diterbitkan maka akan langsung dibawah ke BUD untuk proses pembuatan SP2D akan tetapi BUD wajib verifikasi kelengkapan berkas atau pengecekan kembali berkas-berkas yang masuk sebelum kuasa BUD menerbitkan SP2D serta menyetujuinya, setelah SP2D diterbitkan selanjutnya SP2D juga SPJ LS, SPP, SPM, selesai dibuat maka langsung dibawah ke bank untuk di pindah bukukan ke rekening pihak ketiga.

3. Pelaksanaan prosedur pengeluaran kas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam prosedur pengeluaran kas pembayaran Tambah Uang (TU) yang ada dalam BPKPD kota Tomohon dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, dimana dalam proses perencanaan atau penganggaran PPKD beserta kepala badan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun merencanakan serta menyetujui perencanaan dan penganggaran dalam sebuah kegiatan, setelah penganggaran selesai disusun maka diserahkan kepada Kuasa BUD (Bendahara umum daerah) untuk menyiapkan dana anggaran yang telah direncanakan tapi sebelumnya Kuasa BUD berhak untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi bagian anggaran, setelah itu BUD wajib menerbitkan Surat Penyediaan Dana(SPD).

Setelah BUD menerbitkan SPD, PPKD wajib membuat SPJ TU untuk dimasukan ke bendahara pengeluaran, setelah SPJ TU dibuat maka masuk dalam tahapan verifikasi berkas atau pengecekan kelengkapan berkas yang ada sehingga jika berkas tidak lengkap dalam setiap SPJ TU, maka bendahara pengeluaran tidak bisa melanjutkan proses penerbitan SPP, Setelah pengecekan berkas sudah lengkap maka akan masuk ke sistem SIPD, dimana dalam sistem SIPD akan langsung membuat SPP juga SPM dan langsung diterbitkan langsung dari sistem SIPD.

Setelah SPJ TU, SPP dan SPM selesai diterbitkan maka akan langsung dibawah ke BUD untuk proses pembuatan SP2D akan tetapi BUD wajib verifikasi kelengkapan berkas atau pengecekan kembali berkas-berkas yang masuk sebelum kuasa BUD menerbitkan SP2D serta menyetujuinya, setelah SP2D diterbitkan selanjutnya SP2D juga SPJ LS, SPP, SPM, selesai dibuat maka langsung dibawah ke bank untuk di pindah bukukan ke rekening bendahara pengeluaran kas dan setelah dipindah bukukan ke rekening bendahara, maka bendahara pengeluaran kas langsung mengirimkan ke rekening pihak ketiga.

Jadi dapat dilihat dalam prosedur pengeluaran kas GU. LS juga TU bahwa bahwa dalam setiap penerbitan dokumen-dokumen yang ada dalam prosedur pengeluaran kas sistem pengendalian intern berperan penting dalam mengawasi setiap proses prosedur pengeluaran kas, terbukti dari adanya unsur pengawasan yaitu verifikasi atau pengecekan berkas/dokumen yang ada dalam prosedur pengeluaran kas, sehingga jika dalam proses penerbitan dokumen-dokumen prosedur pengeluaran kas tidak lengkap atau terdapat kesalahan/kekeliruan maka bendahara pengeluaran tidak akan melanjutkan setiap proses pengeluaran kas yang ada sehingga setiap pihak-pihak yang berhubungan dalam proses pembuatan dokumen-dokumen yang ada dalam prosedur pengeluaran kas diwajibkan untuk membuatnya dengan syarat juga ketentuan yang berlaku

Pelaksanaan Sistem pengendalian intern pengeluaran kas

Dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pengeluaran kas melalui hasil wawancara yang didapatkan bahwa BPKPD kota Tomohon telah menerapkan sistem pengendalian intern pada pengeluaran dengan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 melalui 5 unsur yang ada yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diperoleh hasil pembahasan bahwa dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam unsur lingkungan pengendalian, BPKPD kota tomohon telah menerapkan sistem pengendalian intern berdasarkan dengan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya Berdasarkan landasan teori bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 bahwa unsur Lingkungan pengendalian, diartikan Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Berdasarkan pengertian yang ada diatas bahwa BPKPD Kota Tomohon telah menerapkan Sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan Porsedur pengeluaran kas yang dimana dilakukan atau diterapkan

berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, seperti bendahara melakukan tugas dan tanggung dalam melaporkan hasil pelaksanaan prosedur pengeluaran kas kepada PPK, setelah itu PPK memiliki tugas dan tanggung jawab juga melaporkan hasil pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada kepala badan sehingga lingkungan pengendalian yang diterapkan dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas berjalan dengan baik.

2. Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam prosedur pengeluaran kas telah berjalan dengan baik berdasarkan dengan aturan yang berlaku. jika dilihat dari landasan teori yang ada bahwa Penilaian resiko berdasarkan dengan Peraturan Nomor 60 Tahun 2008 diartikan bahwa Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Berdasarkan landasan teori yang ada diatas bahwa Penilaian Resiko yang ada dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yaitu biasanya terjadi dua resiko yaitu resiko internal dimana adanya ketidaklengkapan dokumen/berkas yang dimasukkan, Biasanya terjadi pada saat proses verifikasi pada saat penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) baik SPP GU, SPP LS ataupun SPP TU, dimana pada saat penerbitan SPP sebelumnya harus diverifikasi kelengkapan berkas dokumen sehingga jika ditemui ada salah satu yang dokumen yang tidak ada maka proses pembuatan SPP GU,LS dan TU tidak bisa diterbitkan yang mengakibatkan pada kegiatan yang dilakukan belum bisa dilaksanakan. ini disebabkan karena setiap bidang memasukan berkas kegiatan tidak lengkap biasanya . Jika ditinjau lebih jauh bahwa perubahan peraturan daerah memicu resiko dalam sebuah instansi terjadi terlebih khusus resiko internal, dimana pergantian staf karyawan seringkali membuat kinerja karyawan pun tidak efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga jika dilihat dari latar belakang yang ada ini terjadi karena perbedaan pemahaman kerja karyawan, kurangnya pengalaman dalam bidang tersebut, dan kurang bimbingan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. akan tetapi badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD) Kota Tomohon selalu berusaha untuk menangani resiko yang dengan berusaha menerapkan penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikannya juga BPKPD kota Tomohon juga melakukan pelatihan dan bimbingan teknis juga diklat kepada setiap karyawan yang ada agar resiko permasalahan yang ada cepat tertangani.

Sedangkan Risiko Eksternal Yaitu kendala jaringan sistem SIPD yang tidak bisa di akses dalam proses penerbitan SPP dan SPM dimana hal ini mengakibatkan proses penerbitan SPP, SPM sampai ke SP2D tertunda. Sehingga jika ditinjau lebih lanjut bahwa kendala tersebut belum bisa tertangani secara langsung karena risiko ini terjadi dari sistem SIPD langsung akan tetapi dari kendala eksternal tersebut BPKPD Kota Tomohon mencoba memakai sistem FMIS yang dimana bisa dikatakan sistem cadangan dalam proses penerbitan SPP, SPM dan SP2D.

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil Wawancara yang telah dilakukan, bahwa BPKPD Kota Tomohon telah menjalankan Kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas berdasarkan dengan aturan yang berlaku, jika dilihat dari landasan teori yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, unsur kegiatan pengendalian diartikan sebagai Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan landasan teori diatas bahwa dalam menerapkan sistem pengendalian intern prosedur pengeluaran kas, Kepala badan selalu mengawasi jalannya pelaksanaan prosedur pengeluaran kas, seperti halnya kepala badan selalu berdiskusi dengan bendahara pengeluaran untuk membahas pelaksanaan prosedur pengeluaran kas, jika ada kendala atau masalah yang ditemui maka kepala badan berusaha membantu bendahara pengeluaran dalam menangani masalah tersebut, dan hal tersebut juga kepala badan terapkan dibidang-bidang lainnya, bahkan kepala badan selalu membuka ruang diskusi saat apel pagi dilaksanakan ataupun setelah ibadah pagi untuk membahas program kerja, masalah atau kendala yang ditemui dalam setiap bidang. Sehingga kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas yang ada di BPKPD Kota Tomohon telah berjalan dengan baik.

4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pengeluaran kas dalam hal ini informasi dan komunikasi dalam BPKPD Kota Tomohon telah menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. jika dilihat dari landasan teori Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 bahwa informasi dan Komunikasi diartikan sebagai Informasi yang harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan landasan teori yang ada diatas bahwa dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pengeluaran kas, telah memanfaatkan sarana yang ada dalam BPKPD kota Tomohon sendiri sesuai dengan kebutuhan. Seperti komunikasi melalui telepon kantor juga Handphone pribadi, selain itu ada juga media sosial yang digunakan seperti Whatsapp, Facebook, Email dan Website BPKPD Kota Tomohon. Selanjutnya sistem informasi yang digunakan oleh BPKPD Kota Tomohon yaitu sistem informasi dari pemerintahan pusat dimana untuk pembaharuannya selalu mengikuti dan sesuai dengan kebijakan dari pusat sehingga BPKPD Kota Tomohon selalu berusaha berupaya dan menggunakan sistem Informasi terbaru demi kelancaran prosedur pengeluaran kas.

5. Pemantauan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa penerapan sistem penegendalian intern pengeluaran kas telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. berdasarkan landasan teori yang ada dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 bahwa Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas kegiatan pemantauan yang dilakukan yaitu bendahara pengeluaran selalu melaporkan hasil laporan pengeluaran kas kepada PPK yang dimana disini PPK memiliki hak menerima hasil laporan pengeluaran kas sehingga PPK Sendiri juga memniliki kewajiba dalam memantau pelaksanaan prosedur pengeluaran kas, setelah PPK menerima laporan hasil pengeluaran kas, maka PPK juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaporkan hasil pengeluaran kas kepada pengguna anggaran atau kepada kepala badan yang artinya PPK sendiri dipantau langsung oleh kepala badan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga kepala badan berhak menerima laporan hasil pengeluaran kas dari PPK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan analisis sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada BPKPD Kota Tomohon dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Prosedur pengeluaran kas yang ada dalam BPKPD Kota Tomohon sudah berjalan dengan baik mulai dari proses penganggaran, SPP, SPM, SP2D, sampai pada Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kas, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pengeluaran kas, BPKPD kota Tomohon telah menerapkan 5 unsur yang ada dalam sistem pengendalian intern berdasarkan dengan peraturan yang ada yaitu:
 - a. Dalam pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas khususnya lingkungan pengendalian, BPKPD sendiri sudah menerapkan dengan baik yang dimana salah satunya ditandai dengan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam prosedur pengeluaran kas.
 - b. Penilaian risiko, Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan penelitian yang ada bahwa risiko/masalah yang ditimbulkan dalam pengeluaran kas ada dua yaitu risiko eksternal dan risiko internal akan tetapi dari risiko yang terjadi BPKPD berusaha untuk menangani setiap risiko yang ditimbulkan dengan. cara melakukan pelatihan dan bimbingan teknis juga Diklat kepada setiap karyawan yang ada, serta menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya
 - c. Informasi dan komunikasi, Informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas di BPKPD sudah baik karena dalam informasi BPKPD Kota Tomohon selalu mengikuti sistem informasi dari pemerintahan pusat .
 - d. Kegiatan Pengendalian, Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas sudah baik karena kepala badan selalu membuka ruang diskusi saat apel pagi atau ibadah pagi dilaksanakan untuk membicara program kerja serta masalah atau kendala yang ditemui
 - e. Pemantauan, Dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dalam BPKPD kota Tomohon telah berjalan dengan baik, pimpinan selalu melakukan pemantauan tugas dan tanggung jawab secara berkala sehingga pelaksanaan prosedur pengeluaran kas berjalan dengan baik

Saran

Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian ini terkait analisis atas penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon yaitu:

1. Dalam penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas sebaiknya BPKPD Kota Tomohon lebih meningkatkan sistem pengendalian intern yang ada terlebih khusus nilai pengawasan dan Pemantauan agar supaya bisa mencegah risiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas seperti risiko internal yang ada dalam pengeluaran kas.
2. Sebaiknya kepala-kepala bidang mengambil kebijakan atau tindakan yang cepat dalam penanganan dokumen-dokumen yang tidak lengkap agar supaya masalah atau risiko yang ada cepat tertangani juga proses penerbitan SPP, SPM sampai SP2D cepat diproses
3. sebaiknya Pemimpin instansi melakukan pelatihan, bimbingan ataupun Diklat bagi setiap karyawan yang ada guna meningkatkan SDM yang ada di BPKPD Kota Tomohon karena dengan Adanya peningkatan SDM yang ada dapat membantu mencegah setiap masalah yang ditimbulkan juga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bekerja

DAFTAR PUSTAKA

- Masanae, W., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2022). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 243-252.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern, online (https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPIP.pdf, 21:10, 25 Maret 2023)
- Pramudiana, A. A. (2017). *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Samaliwu, T. H. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1065-1072.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Yuliani, F. (2022). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Magetan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo)